



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Clearing House
Pengadaan

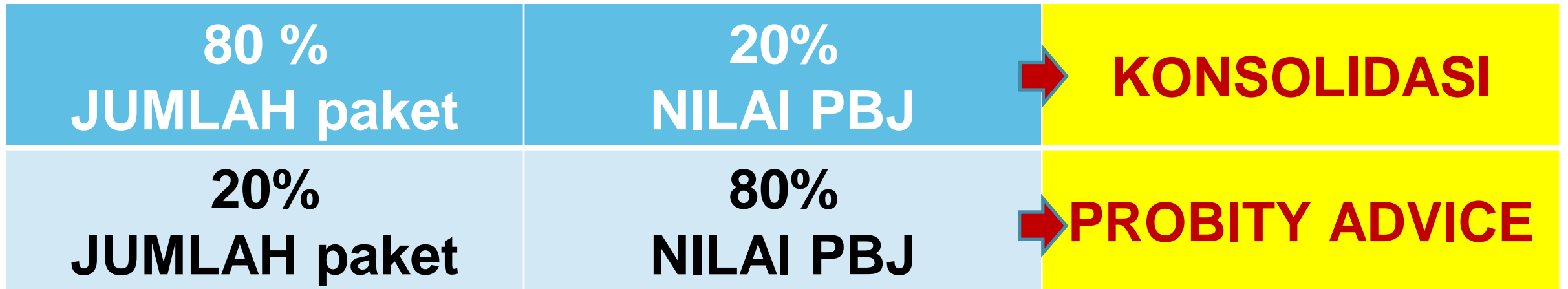
***CLEARING HOUSE* PENGADAAN**
SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PENGADAAN

Disampaikan oleh:

TATANG RUSTANDAR WIRAATMADJA

Direktur Advokasi Pemerintah Daerah
LKPP

TRANSFORMASI DAN OPTIMASI PBJP



CLEARING HOUSE

KONSOLIDASI PENGADAAN

Tahapan PBJ	Pelaku	Bentuk/Hasil Konsolidasi
Perencanaan PBJ	<ul style="list-style-type: none">• PA/KPA• UKPBJ/TAPD	<ul style="list-style-type: none">• Penggabungan paket• Kontrak Payung• Katalog Daerah
Persiapan PBJ	PPK	<ul style="list-style-type: none">• Kontrak Bersama
Pemilihan	UKPBJ	<ul style="list-style-type: none">• Lelang Itemized

CLEARING HOUSE

Latar Belakang

Koordinasi kurang efektif

Ragu dalam pengambilan keputusan

Banyaknya tekanan dari berbagai pihak

Memahami pengadaan hanya sebatas aturan

Ketakutan akan dampak hukum



*Dibutuhkan solusi penanganan permasalahan yang **komprehensif, cepat, dan efektif***

5 Besar OPD Dengan Jumlah Paket Terbanyak

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR_	1.100 Paket_
DINAS KESEHATAN	2.066 Paket_
DINAS PENDIDIKAN	5.266 Paket_
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN_	742 Paket_
SEKRETARIAT DAERAH	486 Paket_

Clearing House Pengadaan



Masalah
Pengadaan



Forum



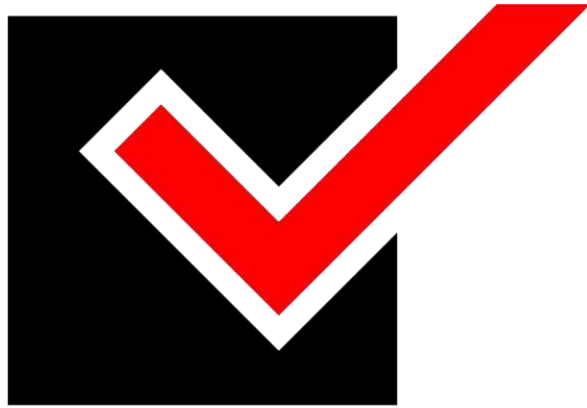
Solusi



Clearing House
Pengadaan



Data



Clearing House Pengadaan

Clearing House Pengadaan adalah Forum untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif

Tujuan *Clearing House* Pengadaan



- Mempercepat pengambilan keputusan secara komprehensif, efektif, dan transparan
- Meningkatkan kapabilitas KLPD dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan
- Mengurangi risiko sengkah, pengaduan dan permasalahan hukum
- Menjaga kepercayaan publik terhadap proses Pengadaan

Sekretariat

Clearing House Pengadaan

Dapat ditempatkan sesuai dengan kesiapan K/L/PD masing-masing



APIP

atau

UKPBJ

atau

Unit Kerja Lainnya

yang dianggap mampu

Bentuk dan Tugas Sekretariat

Clearing House
Pengadaan

- Berbentuk Ad Hoc
- Memfasilitasi pelaksanaan Forum *Clearing House* Pengadaan
- Mendokumentasikan pelaksanaan *Clearing House* Pengadaan

Sekretariat *Clearing House* Pengadaan

APIP

- Fungsi Konsultasi
- Sumber daya memadai
- Memahami manajemen risiko

UKPBJ

- Permasalahan
- Tersedia anggaran
- Sumber daya memadai

OPD Lainnya

- Memiliki fungsi koordinatif
- Tersedia sumber daya yang cukup

- Dokumentasi
- Mengagendakan pertemuan
- Fungsi administrasi /keuangan



LKPP dapat melakukan pendampingan kepada K/L/PD dalam proses pembentukan hingga pelaksanaan *Forum Clearing House* Pengadaan

Perpres No. 16 Tahun 2018

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.



APIP

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2008
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

)Kegiatan pengawasan lainnya berupa **konsultansi*

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;
- b. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-monev*, *SIKaP*, dan
- c. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.



UKPBJ

Per. LKPP No. 14 Tahun 2018

Alur Proses *Clearing House* Pengadaan



Usulan
Pembahasan



Sekretariat
mengkoordinir
pelaksanaan
Clearing House
Pengadaan



Pelaksanaan Forum
Clearing House
Pengadaan



Pelaku pengadaan dapat
mengambil keputusan
berdasarkan rekomendasi



Sekretariat
mendokumentasikan
hasil *Clearing House*
Pengadaan

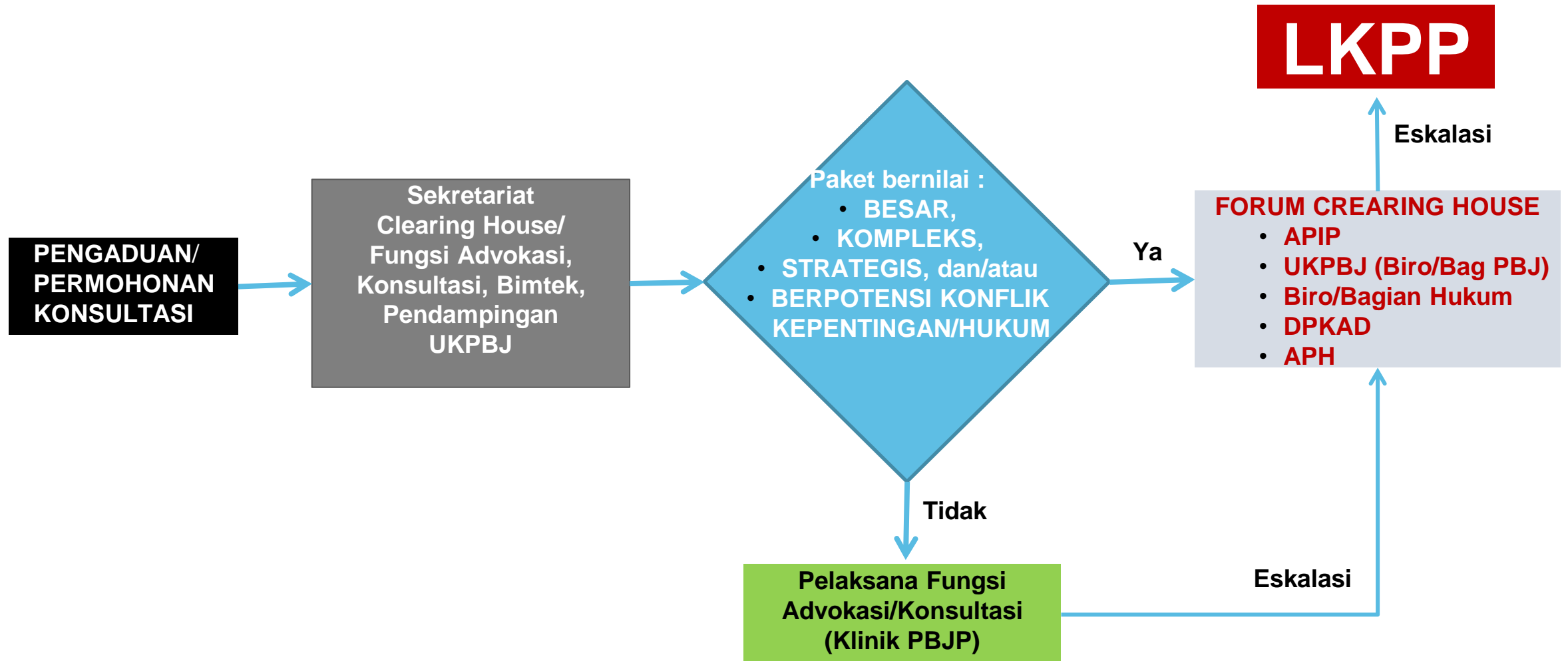
LKPP

Kriteria Permasalahan

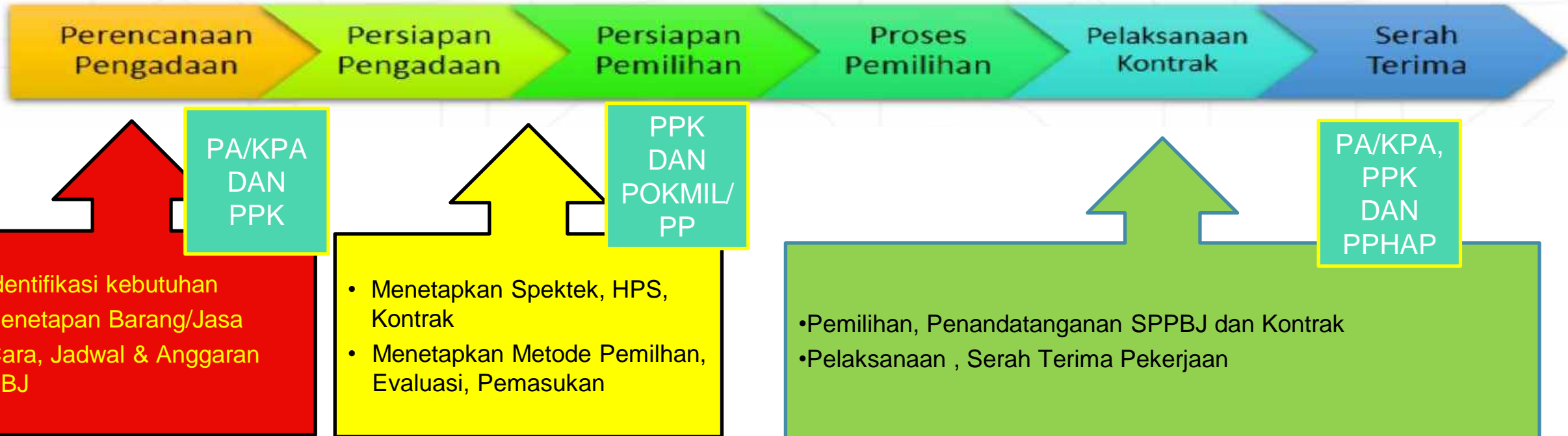


GARIS BESAR ALUR PELAKSANAAN CLEARING HOUSE

Bahan Diskusi



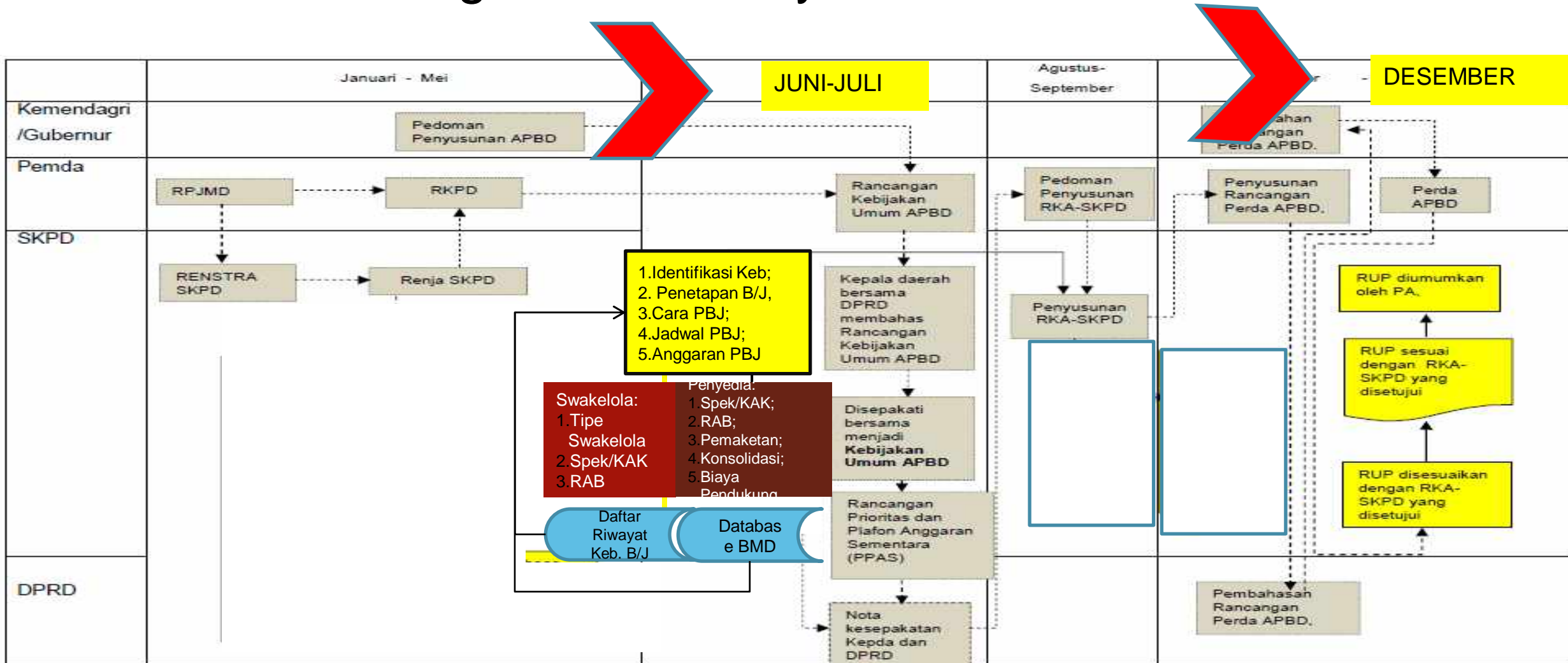
Tahapan Dan Peran Apip Dalam Pengadaan



Pengawasan Pengadaan oleh APIP sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

Pemenuhan nilai manfaat, Kepatuhan, TKDN, PDN, Pencadangan dan Peruntukan UK, Pengadaan Berkelanjutan (Pasal 76 Perpres 16/18)

Perencanaan Pengadaan – Penyusunan APBD



Keterangan gambar:

-  Proses penyusunan RKA-SKPD
-  Proses penyusunan RUP oleh PA

SURAT EDARAN LKPP NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PBJ TAHUN 2020

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa tanpa terkecuali sebagaimana Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengumuman dan Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan.

Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) tidak terikat tahun anggaran.

Proses Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada tahun 2019, dilaksanakan oleh KPA, PPK, dan Pokja Tahun Anggaran 2019.

Langkah-langkah percepatan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Memastikan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

Memerintahkan seluruh PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan sebelum Tahun Anggaran 2020.

Langkah-langkah percepatan oleh UKPBJ/ Kelompok Kerja Pemilihan

Kepala UKPBJ segera menetapkan Pokja.

UKPBJ/Pokja melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP termasuk konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

Langkah-langkah percepatan oleh PPK

Segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) termasuk dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

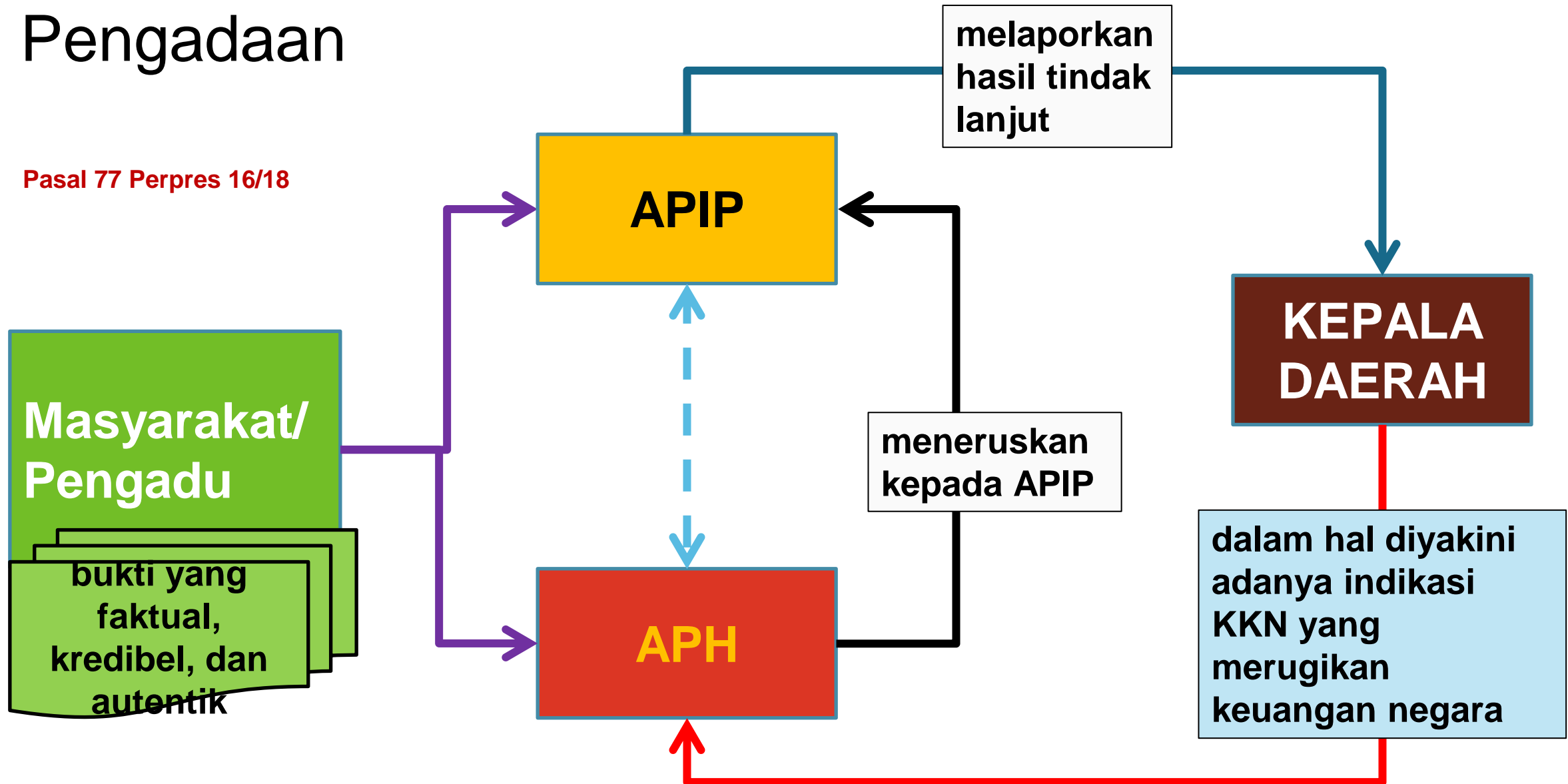
Pengawasan dan pendampingan

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada LKPP dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.

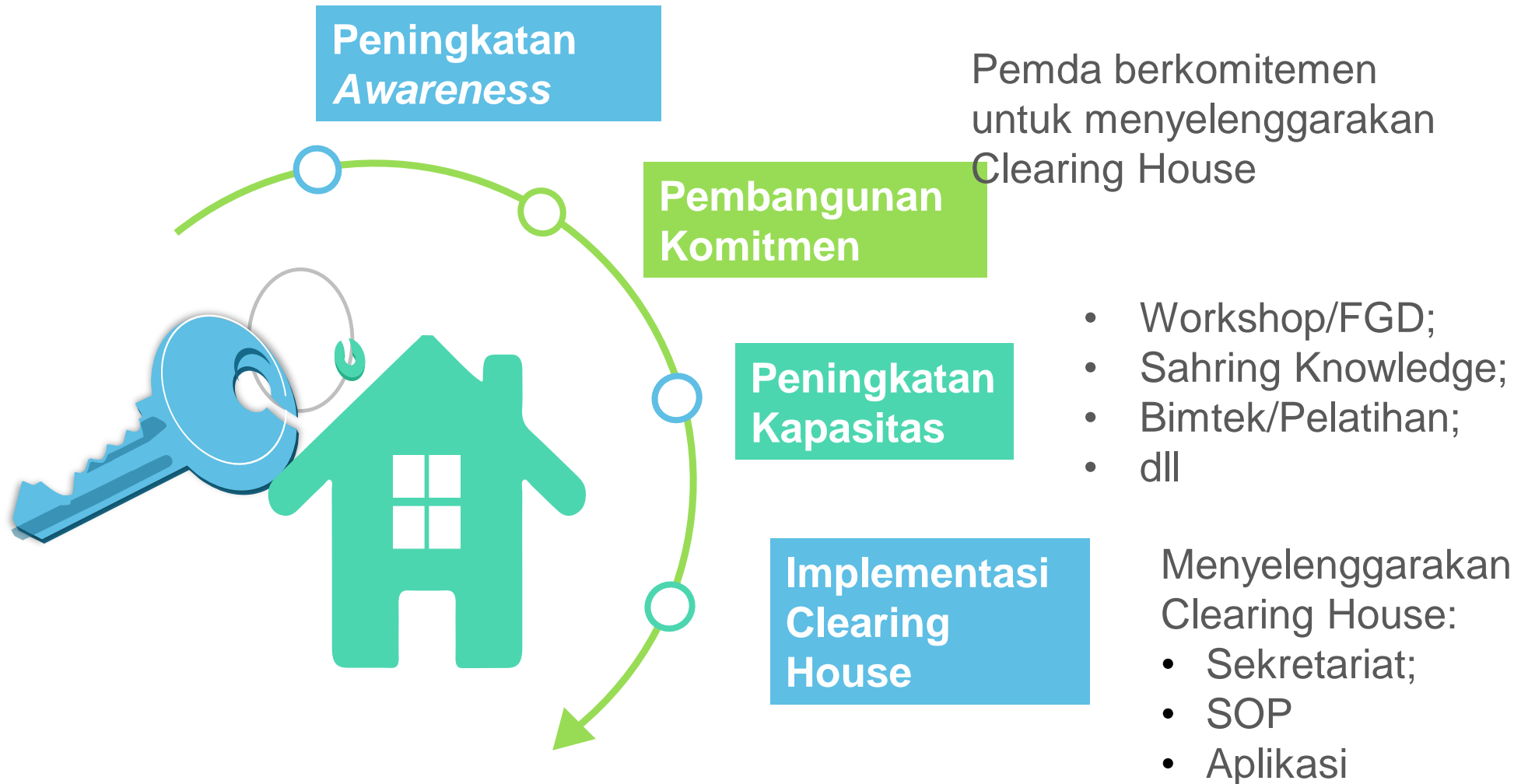
Peran APIP Dalam Pengaduan Pengadaan

Pasal 77 Perpres 16/18



Tahapan

- Diseminasi
- Diskusi/FGD
- Konsultasi





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terima Kasih